

# Penerapan Aset Tetap Berdasarkan SAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo

Dwi Cahya R.S<sup>1\*</sup>, Yulinartati<sup>2</sup>, Elok Fitriyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 15 February 2020

Received in revised form

30 March 2020

Accepted 20 April 2020

Available online 28 May  
2020

### Kata Kunci:

Aset Tetap, SAP 07

### Keywords:

Fixed Assets, SAP 07

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo, jalan Baluran No.03, Panarukan Kabupaten Situbondo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aset tetap berdasarkan SAP 07. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan metode langsung melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan kepala dinas PUPR Kabupaten Situbondo. metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pada dinas PUPR belum sesuai dengan SAP 07. Hal ini dikarenakan dari laporan keuangan dan dari pihak SDM sendiri belum menerapkan SAP 07 berbasis akrual tetapi masih berbasis kas.

## ABSTRACT

This research was conducted at the Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo, jalan Baluran, No.03, Panarukan Kabupaten Situbondo. The purpose of this study was to determine the application of fixed assets based on SAP 07. Data collection was carried out using a questionnaire with the direct method through interviews and documentation directly with the head of the Situbondo PUPR service. Research methods using qualitative methods. The results showed that the application of the PUPR service is not in accordance with SAP 07. This is because of the financial statements and from the HR itself has not applied accrual-based SAP 07 but is still cash-based.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

\* Corresponding author.

E-mail addresses: [dwicahya692@gmail.com](mailto:dwicahya692@gmail.com) (Dwi Cahya R.S)

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan aset. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu, sistem atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.

Menurut Riyanto & Agus (2015:1) menjelaskan akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lainlain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap (Hartoko, 2017).

Pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2013:2).

Sedangkan pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap juga merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*) Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.

Permasalahan yang ada pada Dinas PUPR adalah terjadi ketidak sesuaian dengan SAP No.07 yaitu, dari penyajian Laporan Keuangan. Menurut narasumber Dinas PUPR sudah berbasis akrual. Namun, pada kenyataannya laporan keuangan dalam penyajiannya berbasis kas.

Pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Harianja (2008) berjudul: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

## 2. Metode

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam penyusunan skripsi ini:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Supomo dan Indriantoro, 2014;146). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan pemerintah daerah atau yang mewakili dalam hal ini bagian akuntansi mengenai tata cara penerapan metode akuntansi tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

### 3. Hasil dan pembahasan

#### 1. Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan SAP No.07

Gedung dan bangunan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung instansi ini dibangun melalui kontrak konstruksi. Gedung dan bangunan yang ada di instansi pun memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Pengakuan aset tetap bangunan dalam Laporan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo diawali dengan melakukan kontrak perjanjian atas transaksi perolehan aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dengan cara sewa lahan/tanah dan swakelola dicatat dalam laporan keuangan dengan mengakui adanya Belanja Modal dan adanya pengeluaran Kas Dinas pada saat terjadinya pengeluaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menggunakan *cash basis* dalam pengakuan belanja. Untuk menyajikan nilai aset tetap yang wajar, Dinas PUPR Kabupaten Situbondo pada akhir periode telah melakukan konversi atas belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan aset tetap.

Dengan adanya perbedaan perlakuan kapitalisasi antara jenis belanja selain Belanja Modal, Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa proses konversi yang dilakukan telah memperhatikan nilai perolehan aset tetap yang wajar.

Pengakuan perolehan aset tetap yang diterima dari donasi dilakukan hanya dengan mengakui adanya penambahan nilai aset dalam neraca dan tidak mengakui adanya belanja ataupun pendapatan atas perolehan tersebut. Hal ini sudah tepat karena dalam proses perolehan aset tetap yang berasal dari donasi tidak terdapat aliran kas yang masuk ataupun yang keluar. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan dan hibah.

#### 2. Penilaian Aset Tetap berdasarkan SAP No.07

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Banyak macam cara dalam proses perolehan aset tetap, diantaranya adakah dibeli secara tunai atau kredit, melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham, hibah atau donasi.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi; harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### 3. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan SAP No.07

Pengukuran dapat dipertimbangkan handal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya yang dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Kemudian, aset tetap tersebut disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Menurut penelitian terdahulu menurut Harianja (2008) berjudul: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Situbondo sudah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP NO.07. namun masih berbasis kas belum akrual. Beberapa laporan keuangan yang disajikan, yaitu, seperti; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus kas dan Neraca. Berikut laporan keuangan yang disajikan pada Dinas PUPR Kabupaten Situbondo:

**Tabel 1.** Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA					
31 DESEMBER 2018 DAN 2017					
No	Uraian	Anggaran 2018	Anggaran 2017	(%)	Realisasi 2017
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.185,00	1.147.701.896,83	382,57	1.228.380.374,26
411	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	300.000.185,00	497.206.680,00	165,74	490.330.765,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Lain-lain PAD yang sah	0,00	650.495.216,83	0,00	738.049.609,26
	JUMLAH PENDAPATAN	300.000.185,00	1.147.701.896,83	382,57	1.228.380.374,26
5	BELANJA			0,00	
51	BELANJA OPERASI	18.308.258.478,00	16.843.277.729,00	92,00	16.261.283.415,00
511	Belanja Pegawai	12.078.919.648,00	11.761.145.540,00	97,37	10.801.221.901,00
512	Belanja Barang	6.229.338.830,00	5.082.132.189,00	81,58	5.460.061.514,00
513	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BELANJA MODAL	169.693.494.389,00	164.021.045.092,00	96,66	146.175.795.648,00
521	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Belanja Peralatan & Mesin	998.490.000,00	983.838.884,51	98,53	705.734.900,00
523	Belanja Gedung & Bangunan	1.138.146.670,00	1.110.295.970,00	97,55	640.962.550,00
524	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	167.556.857.719,00	161.926.910.237,50	96,64	144.829.098.198,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	188.001.752.867,00	180.864.322.821,00	96,20	162.437.079.063,00
6	TRANSFER			0,00	

61	TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Transfer Bagi Hasil Pajak			0,00	
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Transfer bantuan keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER SURPLUS/ (DEFISIT)	188.001.752.867,00	180.864.322.821,05	96,20	162.437.079.063,00
		(187.701.752.682,00)	(179.716.620.924,22)	95,75	(161.208.698.688,74)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(187.701.752.682,00)	(179.716.620.924,22)	95,75	(161.208.698.688,74)

Tabel 2. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO					
LAPORAN OPERASIONAL					
31 DESEMBER 2018 DAN 2017					
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
811	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah	497.206.680,00	490.330.765,00	6.875.915,00	0,01
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	650.495.216,83	738.049.609,26	(87.554.392,43)	(0,12)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.147.701.896,83	1.228.380.374,26	(80.678.477,43)	(0,07)
82	PENDAPATAN TRANSFER				
821	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA				
	PERIMBANGAN				
82101	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
82102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00

	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
822	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
823	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
82302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
831	Pendapatan Hibah	0,00	147.240.000,00	(147.240.000,00)	(1,0 0)
832	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	147.240.000,00	(147.240.000,00)	(1,0 0)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.147.701.896,83	1.375.620.374, 26	(227.918.477,43)	(0,1 7)
9	BEBAN				
911	Beban Pegawai	11.761.145.540,0 0	10.784.895.592 ,00	976.249.948,00	0,09
91201	Beban Persediaan	901.466.704,00	552.040.069,11	349.426.634,89	0,63
91202	Beban Jasa	1.878.408.798,00	2.658.838.184, 00	(780.429.386,00)	(0,2 9)
91203	Beban Pemeliharaan	1.938.986.560,00	1.593.920.091, 00	345.066.469,00	0,22
91204	Beban Perjalanan Dinas	490.635.903,00	347.923.285,00	142.712.618,00	0,41
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
91701	Beban Penyusutan	186.581.867.553, 52	80.404.994.464 ,17	106.176.873.089, 35	1,32
91702	Beban Amortisasi	0,00	69.116.725,00	(69.116.725,00)	(1,0 0)
91703	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
91704	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Beban Lain-lain	461.130.150,00	0,00	461.130.150,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	204.013.641.208, 52	96.411.728.410 ,28	107.601.912.798, 24	1,12
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(202.865.939.31 1,69)	(95.036.108.03 6,02)	(107.829.831.27 5,67)	1,13
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				

841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(202.865.939.311,69)	(95.036.108.036,02)	(107.829.831.275,67)	1,13
	POS LUAR BIASA				
851	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(202.865.939.311,69)	(95.036.108.036,02)	(107.829.831.275,67)	1,13

**Tabel 3.** Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
TAHUN 2018 DAN 2017				
No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017
1	EKUITAS AWAL	1.673.339.420.975,74		1.516.523.587.138,57
2	SURPLUS DEFISIT - LO	(202.865.939.311,69)		(95.036.108.036,01)
3	R/K PPKD	180.282.779.924,22		161.208.698.688,74
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	99.297.606.095,85		90.643.243.184,44
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-		-
42	SELISIH REVALUASI/KOREKSI ASET TETAP	99.297.606.095,85		90.659.569.493,44
43	LAIN-LAIN	-		(16.326.309,00)
4	EKUITAS AKHIR	1.750.053.867.684,11		494.007.092.506,59

**Tabel 4.** Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO				
NERACA SKPD				
31 DESEMBER 2018 DAN 2017				
No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2018	Tahun 2017	
1	ASET	-	-	
11	ASET LANCAR	-	-	
11102	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	-	

11104	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	-
11105	Kas di Bendahara Kapitasi	-	-
11106	Kas Lainnya	-	-
11107	Setara Kas	-	-
11301	Piutang Pajak	-	-
11302	Piutang Retribusi	21.527.492,00	21.527.492,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
11304	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-
11305	Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
11401	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	-
11410	Piutang Lainnya	167.009.502,82	-
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(21.527.492,00)	(21.527.492,00)
11601	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
11605	Beban Lainnya	-	-
11701	Persediaan	610.169.100,00	759.879.504,00
JUMLAH ASET LANCAR		777.178.602,82	759.879.504,00
13	ASET TETAP		
13101	Tanah	965.433.416.210,00	946.552.694.850,00
13201	Peralatan dan Mesin	8.567.126.861,49	7.392.022.976,98
13301	Gedung dan Bangunan	11.474.286.908,02	11.016.386.088,02
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.504.378.781.506,85	1.341.665.273.472,13
13501	Aset Tetap Lainnya	121.988.800,00	121.988.800,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
13701	Akumulasi Penyusutan	(740.830.311.205,06)	(634.277.880.087,38)
JUMLAH ASET TETAP		1.749.145.289.081,29	1.672.470.486.099,74
15	ASET LAINNYA		
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15102	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
15301	Aset Tak Berwujud	291.015.900,00	291.015.900,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(291.015.900,00)	(291.015.900,00)
15401	Aset Lain-lain	131.400.000,00	131.400.000,00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		131.400.000,00	131.400.000,00
JUMLAH ASET		1.750.053.867.684,11	1.673.361.765.603,74
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
21201	Utang Bunga	-	-
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
21501	Utang Belanja	-	22.344.628,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
21602	Utang Uang Jaminan	-	-
21201	Utang Bunga	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	22.344.628,00
JUMLAH KEWAJIBAN		-	22.344.628,00
3	EKUITAS		
31101	Ekuitas	1.750.053.867.684,11	1.673.339.420.975,74
JUMLAH EKUITAS		1.750.053.867.684,11	



		1.673.339.420.975,74
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.750.053.867.684,11	1.673.361.765.603,74

#### 4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mendefinisikan aset tetapnya Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mengartikan sebagai aset yang dimiliki dinas PUPR untuk digunakan sebagai operasional usaha yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu tahun.
2. Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mengelompokkan aset tetap berdasarkan jenisnya berupa tanah, gedung & bangunan, peralatan & mesin, Jalan, Irigasi & Jaringan, Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, maka hal ini sudah sesuai dengan SAP 07.
3. Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk penyusutan aset tetapnya sesuai dengan SAP 07 dengan memberikan pengertian penyusutan sebagai pengalokasian harga perolehan suatu aset tetap untuk dijadikan sebagai beban pada periode-periode akuntansi perusahaan sesuai dengan masa manfaat aset tersebut dan dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusutannya Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menggunakan metode garis lurus.

#### Daftar Rujukan

- Anonim, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual., Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bachtiar Arif, Muklis & Iskandar. 2009. *Akutansi Pemerintahan. Aka Media, Jakarta*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga. dan Gatot Soepriyanto, 2004. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun 2009, *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hartoko, M. Setiadi. 2017. ASET TETAP (Studi Kasus di PT IFCA PROPERTY365 INDONESIA). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 5 No. 1, July 2017
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Modul tentang *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Mahsun, Mohamad., Sulistyowati Firma., Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE. Yogyakarta. , Putra, Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor publik*, Andi, Yogyakarta.

- Masipuang, Y., Ilat, V., Pinatik, S., 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. Volume 10.Nomor 3. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Mulalinda, Veronika. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN: 2303-1174 Vol.2 No.1 Maret 2014. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4169/3695>. Diakses 08 April 2015. Hal 521-531.
- Mustika Rasyidah.,2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. *Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM*, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012. <http://maks.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163>. Diakses 08 April 2015. Hal 1.